

## **ABSTRAK**

Skripsi ini menganalisis tentang perspektif politisi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Palembang terhadap tertundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang awalnya diinisiasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak 2012 sebagai upaya menyelamatkan kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Namun pembahasan RUU ini memerlukan waktu yang cukup lama di rapat parlemen karena pro dan kontra yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan internal legislatif. Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu partai politik yang menolak pembahasan RUU tersebut karena dinilai kurang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Serta aksi serentak mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia yang memberi respon terhadap pembahasan RUU ini.

Metode kualitatif digunakan untuk meneliti skripsi ini, yakni data diambil melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Sumber data dari penelitian adalah beberapa politisi Partai Keadilan Sejahtera di DPD Kota Palembang. Kemudian skripsi ini dikaji dengan menggunakan Teori *Sexual Politic* konsep dari Kate Millet mengingat bahwa permasalahan kekerasan seksual ini sangat memerlukan perhatian walaupun sifatnya sensitif di berbagai kalangan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tertunda, yaitu kontroversi dari isi naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai multitafsir. Sehingga diperlukan perbaikan dari isi naskah akademik baik dari definisi dan pasal yang ada agar dapat menjadi solusi permasalahan kekerasan seksual.

***Kata Kunci : Perspektif, Partai Keadilan Sejahtera, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual***

## ABSTRACT

*The research is entitled “The Perspective of Partai Keadilan Sejahtera Politicians in The Regional Management Council (DPD) of Palembang City on The Delay in Discussion The Draft of Law (RUU) on The Elimination of Sexual Violence”. The draft of law on the elimination of sexual violence, which was originally initiated by the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) since 2012 as an effort to save Indonesia's emergency condition of sexual violence against women and children. However, the discussion of this draft takes a long time in the parliament meeting because of the pros and cons that occur in various levels of society and the internal legislature. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) became one of the political parties that rejected the discussion of this draft because it was deemed inappropriate to solve the existing problems. As well as the simultaneous actions of students in various parts of Indonesia who responded to the discussion of this draft.*

*Qualitative methods were used to research this thesis, namely the data were taken through interviews and documentation to obtain information that supports the analysis and interpretation of the data. Sources of data from the study were several politicians of the Partai Keadilan Sejahtera in the DPD Palembang City. Then this research is studied using the concept of Sexual Politic Theory from Kate Millet considering that the problem of sexual violence really needs attention even though it is sensitive in various circles of society. The results of this study indicate that the cause of the postponement of the draft of law on the elimination of sexual violence, namely the controversy over the contents of the academic text of the draft of law on the elimination of sexual violence, which is considered to have multiple interpretations. So that it is necessary to improve the content of academic texts both from the existing definitions and articles in order to be a solution to the problem of sexual violence.*

***Keywords: Perspective, Partai Keadilan Sejahtera, The Draft of Law Elimination of Sexual Violence***